



Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota
Nomor 33 Tahun 2023
tentang
Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan
Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima
Puluh Kota Tahun 2024



Sarilamak 2023



SALINAN

BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
9. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah rencana kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota.
10. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
12. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
14. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Pasal 2

Maksud penyusunan Renja PD adalah untuk :

- a. menjabarkan Program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD Tahun 2024 sesuai dengan urusan dan kewenangan masing-masing PD; dan
- b. menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan Program, kegiatan, dan sub kegiatan masing-masing PD untuk tahun 2024.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Renja PD adalah untuk :

- a. memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf PD dalam melaksanakan Program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024;
- b. menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi pada masing-masing PD; dan
- c. menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD tahun 2024.

Pasal 4

(1) Renja PD disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. bab I memuat pendahuluan;
- b. bab II memuat hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
- c. bab III memuat tujuan, sasaran, Program dan kegiatan;
- d. bab IV memuat rencana kerja dan pendanaan PD; dan
- e. bab V memuat penutup.

(2) Renja PD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan rincian sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
2. Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Rencana Kerja Inspektorat;
4. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
5. Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran;
9. Rencana Kerja Dinas Sosial;
10. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
12. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

13. Rencana Kerja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
 14. Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
 15. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
 16. Rencana Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga;
 17. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari;
 18. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
 19. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman;
 20. Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan;
 21. Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 22. Rencana Kerja Dinas Perikanan;
 23. Rencana Kerja Dinas Pangan;
 24. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 25. Rencana Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan;
 26. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 27. Rencana Kerja Badan Keuangan;
 28. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 29. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 30. Rencana Kerja Kecamatan Gunuang Omeh;
 31. Rencana Kerja Kecamatan Bukik Barisan;
 32. Rencana Kerja Kecamatan Suliki;
 33. Rencana Kerja Kecamatan Guguaq;
 34. Rencana Kerja Kecamatan Mungka;
 35. Rencana Kerja Kecamatan Akabiluru;
 36. Rencana Kerja Kecamatan Payakumbuh;
 37. Rencana Kerja Kecamatan Luak;
 38. Rencana Kerja Kecamatan Lareh Sago Halaban;
 39. Rencana Kerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari;
 40. Rencana Kerja Kecamatan Harau;
 41. Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru;
 42. Rencana Kerja Kecamatan Kapur IX.
- (3) Renja PD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud ayat (2), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Kepala PD menyusun Renja PD Tahun 2024 dengan berpedoman kepada RKPD Tahun 2024 dan Rencana Strategis PD.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penjabaran dari RKPD.

Pasal 6

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja PD dilakukan oleh masing-masing Kepala PD.

Pasal 7

Perubahan Renja PD Tahun 2024 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 14 Desember 2023

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

ttd

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO


Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 14 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd

HERMAN AZMAR
BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2023 NOMOR 33

salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. LIMA PULUH KOTA


ERI FORTUNA, SH
NIP.19660104199303 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 33 TAHUN 2023
TANGGAL : 14 DESEMBER 2023
TENTANG : RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

1. Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
2. Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Rencana Kerja Inspektorat;
4. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
5. Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran;
9. Rencana Kerja Dinas Sosial;
10. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
12. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Rencana Kerja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
14. Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
15. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Rencana Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga;
17. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari;
18. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
19. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman;
20. Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan;
21. Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
22. Rencana Kerja Dinas Perikanan;
23. Rencana Kerja Dinas Pangan;
24. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
25. Rencana Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan;
26. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
27. Rencana Kerja Badan Keuangan;
28. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
29. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
30. Rencana Kerja Kecamatan Gunuang Omeh;
31. Rencana Kerja Kecamatan Bukik Barisan;
32. Rencana Kerja Kecamatan Suliki;
33. Rencana Kerja Kecamatan Guguak;
34. Rencana Kerja Kecamatan Mungka;
35. Rencana Kerja Kecamatan Akabiluru;
36. Rencana Kerja Kecamatan Payakumbuh;
37. Rencana Kerja Kecamatan Luak;
38. Rencana Kerja Kecamatan Lareh Sago Halaban;
39. Rencana Kerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari;
40. Rencana Kerja Kecamatan Harau;
41. Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru;
42. Rencana Kerja Kecamatan Kapur IX.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. LATAR BELAKANG	1
I.2. LANDASAN HUKUM	2
I.3. MAKSUD DAN TUJUAN	6
I.4. SISTEMATIKA	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN LALU	8
II.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD ...	8
II.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD	38
II.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD	40
II.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	45
II.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	63
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	66
III.1. TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	66
III.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH	68
III.3. PROGRAM DAN KEGIATAN	70
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	73
BAB V PENUTUP	81



DAFTAR TABEL

Tabel Strategi dan Arah Kebijakan	32
Tabel T-C. 29, Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2022 Kabupaten Lima Puluh Kota	34
Tabel T-C. 30, Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	39
Tabel T-C. 31, Penghitungan Produksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	39
Tabel T-B. 35, Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Pertanian	42
Tabel Review terhadap Rancangan Awal RKPD	46
Tabel T-C. 32, Usulan Pokok Pikiran dan Musrenbang dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Lima Puluh Kota Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	63
Tabel Hubungan Visi, Misi Tujuan Sasaran Daerah dan Sasaran Dinas	69
Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	69
Tabel T-B. 36, Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas	72
Tabel T-C. 33 Rencana Target Kinerja IKU KD/IKU OPD	73
Tabel Rencana Target Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2021	73
Tabel Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kepala OPD	73
Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Lima Puluh Kota	74



BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun ini menyusun Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024. Renja SKPD merupakan dokumen rencana



pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

I.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4437).
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan



- Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Kementerian dan Lembaga;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4124;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80



- Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencanan Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia, Tahun 2017 Nomor 1312);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus;
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
24. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 114 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Nomor 114);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 1);
26. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 140);



27. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 103 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 103);
28. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 36)

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024.

Sedangkan tujuan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Acuan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota selama tahun 2024.

I.4. SISTEMATIKA

Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2024 ini terdiri dari beberapa Bab sebagai berikut :

- I. **Pendahuluan**, Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan,



sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan hukum
- 1.3 Maksud dan tujuan
- 1.4 Sistematika penelitian

II. **HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**, yang berisi evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Distanhortbun, analisis kinerja pelayan Distanhortbun, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Distanhortbun dan sebagainya.

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian Renstra perangkat daerah
- 2.2 Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah
- 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah
- 2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD
- 2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

III. **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**, yang memuat telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran Renja Distanhortbun dan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2024

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja perangkat daerah
- 3.3 Program dan kegiatan

IV. **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**, Memuat Program dan Kegiatan Dinas dalam mewujudkan rencana kerja yang telah disusun.

V. **PENUTUP**, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN LALU

II.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota selama tahun 2023 dan perkiraan target tahun 2024. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan



indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Pada Tahun **2022** Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan mendapatkan anggaran APBD sebesar Rp. 21.746.346.375,- dimana belanja langsung yang terdiri 5 Program dan 14 kegiatan.

Nilai capaian kinerja untuk 14 kegiatan tersebut berkisar dari yang terendah 86,26% sampai yang tertinggi 100% dengan rata-rata keseluruhan sebesar 98,40%.

Melalui segi akuntabilitas keuangan dari Rp. 21.746.346.375,- anggaran yang tersedia, terealisasi sebesar Rp. 20.471.222.264,- (94,14%).

Secara umum tidak terdapat permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan ini. Alokasi dana dan realisasi fisik kegiatan cukup berimbang, beberapa kegiatan dengan realisasi fisik dibawah 90 % antara lain :

- a. Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani** dengan realisasi fisik 89,75%. Keluaran dari kegiatan adalah Pembangunan/rehab jalan usaha tani dengan capaian kinerja berupa 3 unit di Kelompok Tani Mekar Sari Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh, Kelompok Tani Pincuran Tujuh Nagari Situjuh Batua Kecamatan Situjuh Limo Nagari, dan Kelompok Tani Kayu Nan Putih Nagari Situjuh Gadang Kecamatan Situjuh Limo Nagari. Sedangkan 3 unit lagi tidak dapat terlaksana karena kesalahan input nama kelompok tani yang seharusnya diinput di sub kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya dan hanya bisa di rubah pada saat perubahan anggaran.



Adapun nama kelompok tani yang tidak bisa terlaksana tersebut adalah kelompok tani bumi atlas Nagari Halaban Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kelompok Tani Kina Banda Raik Nagari Baruah Gunuang Kecamatan Bukik Barisan dan Jalan Simpang Kubang Suku-Pisang.

- b. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa** dengan realisasi fisik 86,26%. Adapun penyebab tidak tercapainya persentase keuangan dan fisik 100% adalah karena waktu kegiatan banyak berada pada akhir tahun. Solusi dan saran yang dapat dilakukan untuk menjawab permasalahan tersebut diatas adalah untuk pelaksanaan kegiatan di masa mendatang di distribusikan lebih ke awal tahun, hingga waktu pelaksanaan lebih lapang.

Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain :

1. Sub Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.755.000,- dan realisasi keuangan Rp. 11.755.000,- atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100% Keluaran dari kegiatan ini adalah 1 Dokumen Rencana Kerja Distanhortbun, 1 Dokumen Rencana Kerja Perubahan Distanhortbun, dan 1 Dokumen Rencana Strategis Distanhortbun.
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.421.400,- dan realisasi keuangan Rp. 10.311.400,- atau 98.94% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100% Keluaran dari kegiatan ini adalah 1 dokumen RKA dinas tahun anggaran 2022.
3. Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.396.200,- dan



realisasi keuangan Rp. 11.286.200,- atau 99,03% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100% Keluaran dari kegiatan ini adalah 1 dokumen RKA perubahan tahun anggaran 2022.

4. Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.889.500,- dan realisasi keuangan Rp. 5.848.500,- atau 99,30% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100% Keluaran dari kegiatan ini adalah 1 dokumen DPA dinas tahun anggaran 2022.
5. Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.448.500,- dan realisasi keuangan Rp. 6.426.500,- atau 99,66% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100% Keluaran dari kegiatan ini adalah 1 dokumen DPA perubahan tahun anggaran 2022.
6. Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 24.132.000,- dan realisasi keuangan Rp. 23.848.000,- atau 98,82% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100% Keluaran dari kegiatan ini adalah 1 dokumen Laporan Evaluasi Kinerja Dinas (LKjIP), 1 dokumen Laporan Evaluasi Kinerja Dinas (LKPJ), dan 12 dokumen Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas.
7. Sub Kegiatan Evaluasi kinerja perangkat daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 199.160.700,- dan realisasi keuangan Rp. 197.427.449,- atau 99,13% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100% Keluaran dari kegiatan ini adalah 1 dokumen database dan 1 tahun monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dinas.
8. Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.347.488.567,- dan realisasi keuangan Rp. 10.321.342.023,- atau 99,75% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100% Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya gaji dan tunjangan ASN selama 1 tahun.
9. Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir Tahun SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.032.600,-



- dan realisasi keuangan Rp. 16.026.600,- atau 99,96% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100% Keluaran dari kegiatan ini adalah 1 dokumen Laporan keuangan dinas.
10. Sub Kegiatan Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.962.600,- dan realisasi keuangan Rp. 3.962.600,- atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100% Keluaran dari kegiatan ini adalah 1 dokumen tanggapan pemeriksaan.
 11. Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.711.000,- dan realisasi keuangan Rp. 5.702.000,- atau 99,84% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100% Keluaran dari kegiatan ini adalah 12 dokumen laporan keuangan bulanan.
 12. Sub Kegiatan Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 475.000,- dan realisasi keuangan Rp. 475.000,- atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100% Keluaran dari kegiatan ini adalah 2 dokumen laporan prognosis.
 13. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.170.200,- dan realisasi keuangan Rp. 1.170.200,- atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100% Keluaran dari kegiatan ini adalah 1 dokumen laporan barang milik daerah.
 14. Sub Kegiatan Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.084.800,- dan realisasi keuangan Rp. 7.074.800,- atau 99,86% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100% Keluaran dari kegiatan ini adalah penatausahaan barang milik daerah selama 1 tahun.
 15. Sub Kegiatan Pelaporan pengelolaan retribusi daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 53.728.800,- dan realisasi keuangan Rp. 1.228.800,- atau 2,29% serta realisasi fisik kegiatan mencapai



75,37% Keluaran dari kegiatan ini adalah 1 dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah.

16. Sub kegiatan Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 21.740.000,- dan realisasi keuangan Rp. 21.730.000,- atau 99,95% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100% Keluaran dari kegiatan ini adalah termonitor dan terevaluasinya kinerja pegawai Distanhortbun baik yang di kantor dan BPP di 13 (tiga belas) Kecamatan.
17. Sub kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.800.000,- dan realisasi keuangan Rp. 10.800.000,- atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100% Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya penyediaan komponen listrik / penerangan bangunan kantor.
18. Sub kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.804.000,- dan realisasi keuangan Rp. 10.804.000,- atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100% Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya sarana dan perlengkapan gedung kantor / kebutuhan kantor.
19. Sub kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dan realisasi keuangan Rp. 100.000.000,- atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100% Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya ATK untuk dinas dan BPP.
20. Sub kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 53.329.300,- dan realisasi keuangan Rp. 53.325.800,- atau 99,99% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100% Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya barang cetakan dan penggandaan.
21. Sub kegiatan Fasilitasi kunjungan tamu dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.990.000,- dan realisasi keuangan Rp. 15.627.000,-



- atau 97,73% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100% Keluaran dari kegiatan ini adalah terlayannya tamu pada Distanhortbun.
22. Sub kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 227.096.000,- dan realisasi keuangan Rp. 227.088.753,- atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100% Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD baik ke dalam daerah maupun keluar daerah.
 23. Sub kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.000.000,- dan realisasi keuangan Rp. 7.000.000,- atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100% Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya benda pos / materai untuk kebutuhan kantor.
 24. Sub kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 112.000.000,- dan realisasi keuangan Rp. 97.411.794,- atau 86,97% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100% Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya jasa komunikasi, sumber air dan listrik untuk kantor Distanhortbun dan BPP di 13 (tiga belas) Kecamatan.
 25. Sub kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 319.500.000,- dan realisasi keuangan Rp. 318.900.000,- atau 99,81% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100% Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya tenaga pelayanan umum kantor berupa petugas administrasi, petugas kebersihan kantor dan BPP, tenaga sopir serta petugas keamanan.
 26. Sub kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 218.344.000,- dan realisasi keuangan Rp. 217.353.096,- atau 99,55% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100% Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 dan 4 bagi



perorangan dan kendaraan dinas jabatan berupa pajak, suku cadang dan service.

27. Sub kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 24.950.000,- dan realisasi keuangan Rp. 23.820.000,- atau 95,47% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100% Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya pemeliharaan peralatan gedung kantor.
28. Sub kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 219.838.000,- dan realisasi keuangan Rp. 19.742.000,- atau 8,98% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100% Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya rehabilitasi gedung kantor Distanhortbun dan kantor BPP di 13 (tiga belas) Kecamatan.
29. Sub kegiatan Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 574.115.100,- dan realisasi keuangan Rp. 410.224.090,- atau 71,45% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya :
 - a. Rapat monitoring dan pembinaan penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan tanggal 31 Oktober 2022 yang dihadiri oleh Tim Verval, Tim Entri RDKK, Distributor Pupuk Kabupaten Lima Puluh Kota, Perwakilan Pengecer dan Tim Pembina Kabupaten.
 - b. Rapat koordinasi pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan tanggal 4 Agustus 2022 yang dihadiri oleh Tim Verval, Tim KP3 dan Distributor Pupuk Kabupaten Lima Puluh Kota.
 - c. Rapat koordinasi pengembangan pupuk organik dilaksanakan tanggal 15 Agustus 2022 dihadiri oleh Koordinator dan Ketua Kelompok Tani yang mendapatkan bantuan UPPO di Kabupaten Lima Puluh Kota.



- d. Rapat sosialisasi pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi Tahun 2022 dilaksanakan tanggal 29 Maret 2022 yang dihadiri Tim Pembina Kabupaten, Tim Entri RDKK, Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan dan Distributor Pupuk Kabupaten Lima Puluh Kota.
 - e. Pengadaan pupuk NPK (15:15:15) mendukung Progul 26 Ha berupa pupuk NPK Ponska diberikan kepada 26 Kelompok tani yang tersebar di 13 (tiga belas) kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota
 - f. Bantuan Saprodi Pengembangan Jagung untuk Keltan Karya Bakti Nagari Gunuang Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru berupa Pupuk NPK Ponska 525 kg.
 - g. Pengadaan Kapur Pertanian untuk mendukung Pengembangan Jagung Kec. Pangkalan Koto Baru sebanyak 63.300 Kg diberikan kepada 4 kelompok tani di Kecamatan Pangkalan Koto Baru
 - h. Pengadaan Pupuk Organik Pengembangan Jagung 62 Ha sebanyak 77.500 kg diberikan kepada 4 Kelompok Tani di Kecamatan Pangkalan Koto Baru
 - i. Pengadaan Pupuk Organik untuk Pengembangan Jagung 40 Ha di Kecamatan Guguak dan Gunuang Omeh sebanyak 45.000 Kg untuk 3 Kelompok Tani
 - j. Pengadaan Pupuk Organik dalam rangka pemeliharaan jeruk di Kecamatan Gunuang Omeh dan Kecamatan Suliki sebanyak 72.000 Kg untuk 9 Kelompok Tani
30. Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.387.145.000,- dan realisasi keuangan Rp. 2.277.387.300,- atau 95,40% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Pengadaan
- a. Hand Traktor Rotari 1 Unit di serahkan kepada kelompok tani Tunas Muda Nagari Mungo Kecamatan Luak,



- b. Hand Traktor Tipe Kecil 7 Unit diserahkan kepada 7 kelompok tani
 - c. Hand Traktor Type Menengah 5 Unit diserahkan kepada 5 kelompok tani
 - d. APPO 1 Paket berupa Alat Pencacah (COPPER) 1 Unit dan 1 Unit Mesin Penjahit Karung diserahkan kepada kelompok tani Sakato Nagari Mungo Kecamatan Luak,
 - e. Bentor 2 Unit diserahkan kepada 2 kelompok tani
 - f. Cultivator 11 Unit dimana 5 unit pendanaannya melalui dana DBHCHT diserahkan kepada 5 kelompok tani dan 6 unit cultivator dari dana DAU diserahkan kepada 6 kelompok tani
 - g. Mesin Potong Rumput 26 Unit diserahkan kepada 6 kelompok tani
 - h. Corn Sheller 3 diserahkan kepada 3 kelompok tani
 - i. Hand Sprayer 2 Unit dan Alat Tanam Jagung 3 Unit diserahkan kepada kelompok tani Karya Bakti Nagari Gunuang Kec. Pangkaan Koto Baru,
 - j. Solar Dryer Portable 3 Unit diserahkan kepada kelompok tani Ngatau Jaya Nagari Pangkalan kec. Pangkalan Koto Baru,
 - k. pH Meter 100 Unit diserahkan kepada 100 Kelompok tani
 - l. Colour Sorter 1 unit diserahkan kepada kelompok tani Hampanan Nagari Limbanang Kec. Suliki,
 - m. RMU 1 Unit diserahkan kepada kelompok tani Lumbuang Padi Nagari Durian Tinggi Kec. Kapur IX,
 - n. Sedangkan Pengadaan Alsintan Brigade adalah 1 unit Combine Harvester Multiguna, 1 unit Alat Penyanggulmadan 1 unit Alat Tanam Jagung.
31. Sub kegiatan Penjaminan kemurnian dan kelestarian SDG hewan/tanaman dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 62.080.000,- dan realisasi keuangan Rp. 61.936.500,- atau 99,77% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100% Keluaran dari kegiatan ini adalah :



- a. Terlaksananya perbanyak Benih Sumber BS, BD dan BP varietas Junjuang dan Banang Pulau yang dilaksanakan di Kelompok Tani Cempaka Nagari Piladang Kec. Akabiluru sejumlah 1.020 kg
 - b. Terlaksananya pengadaan benih jagung Pioneer (P32) sebanyak 85 kg dan pupuk NPK (Phonska Plus) sebanyak 875 kg untuk kelompok tani Boncah Pulau Topuang Nagari Mungka Kec. Mungka.
32. Sub kegiatan pemanfaatan SDG hewan/tanaman dengan alokasi anggaran sebesar Rp515.003.500,- dan realisasi keuangan Rp. 91.505.250,- atau 17,77% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100% Keluaran dari kegiatan ini adalah :
- a. Terlaksananya perbanyak Benih Sumber BP varietas Junjuang dan Banang Pulau yang dilaksanakan di Kelompok Tani Cempaka Nagari Piladang Kec. Akabiluru sejumlah 1.040
 - b. Terlaksananya pengadaan benih jagung Hibrida varietas Pioneer (P32) dalam mendukung Program Unggulan di 13 Kecamatan sebanyak 702 kg masing- masing kelompok tani mendapatkan 27 kg
 - c. Terlaksananya pengadaan benih jagung Varietas Nassa 29 sebanyak 1.500 kg untuk 6 kelompok tani dalam mendukung pengembangan jagung
 - d. Terlaksananya pengadaan benih padi Inbrida untuk 50 kelompok tani sebanyak 10.525 kg mendukung peningkatan pemakaian benih unggul berlabel. Benih padi terdiri dari 2 varietas yakni varietas Junjuang dan Banang Pulau
 - e. Terlaksananya pengadaan bibit Aren (Enau) sebanyak 2.000 batang untuk kelompok tani Maju Bersama Nagari Batu Balang Kec. Harau.
 - f. Terlaksananya pengadaan bibit durian dengan 4 varietas yaitu Varietas Matahari, Bawor, Kani dan Musangking sebanyak 641 batang di 3 kelompok tani yaitu : kelompok tani Putra Siboka



- Nagari Andiang Kecamatan Suliki 242 batang, kelompok tani berkah nagari koto tengah kecamatan bukit barisan sebanyak 200 batang dan kelompok tani lembah permata Nagari Andiang kecamatan suliki sebanyak 200 batang.
- g. Terlaksananya pengadaan saprodipengembangan jagung berupa benih jagung Pioneer P32 sebanyak 30 kg dan untuk kelompok tani Karya Bakti Nagari Gunung Malintang Kec. Pangkalan.
33. Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 157.626.000,- dan realisasi keuangan Rp. 157.577.361,- atau 99,97 % serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah 1 (satu) dokumen Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan / LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan / KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan / LCP2B yang dikelola dimana sebaran Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) di 13 (tiga belas) kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota seluas 20.448,22 yang terdiri dari LP2B seluas 19.125,45 Ha dan LCP2B seluas 1.322,77 Ha.
34. Sub Kegiatan Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunandengan alokasi anggaran sebesar Rp. 325.890.000,- dan realisasi keuangan Rp. 325.890.000,- atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah 1 (satu) dokumen masterplan dan action plan pengembangan kawasan jagung di Kabupaten Lima Puluh Kota dimana sebaran lahan potensi pengembangan kawasan jagung di 13 (tiga belas) kecamatan berdasarkan hasil analisis dan verifikasi lapangan dengan kondisi "**sangat sesuai**" yaitu S1 dapat bersumber dari pemanfaatan lahan



sawah (pengaturan pola tanam) dengan potensi pengembangan seluas 11.901 Ha dan pembukaan lahan baru selain lahan sawah dengan potensi seluas 35.597 Ha.

35. Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.850.000.000,- dan realisasi keuangan Rp.1.849.999.000,- atau 100 % serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah 5 unit Irigasi Tanah Dangkal, 3 unit Irigasi Tanah Dalam dan 3 unit Irigasi Tersier sehingga total sub kegiatan ini adalah 11 unit. Irigasi Tanah dalam Tersebar di Kecamatan Lareh sago Halaban sebanyak 3 (tiga) unit di keltan Cimpago – Bukik Sikumpa, keltan Harapan Bersama – Koto Tinggi Kec. Gunuang Omeh dan keltan Pemuda Milenial- Muaro Paiti kec. Kapur IX. Dan untuk irigasi tanah dangkal sebanyak 5 (lima) unit tersebar di keltan Tunas Muda – Durian tinggi kec. Kapur IX, keltan Tampang Saiyo – Sialang kec. Kapur IX dan keltan Sumber nagari Koto Lamo. Di kec. Harau di keltan Hasta Karya – nagari Solok Bio-bio, keltan Venus di nagari Baruah Gunuang kec. Bukik Barisan. Untuk irigasi tersier terbangun 3 (tiga) unit yang tersebar di kec. Lareh Sago Halaban di keltan Calang – Sitanang, keltan Kampung Panjang Saiyo, nagari Durian Tinggi kec. Kapur IX dan keltan Satu Hati nagari Sarilamak kec. Harau.
36. Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dan realisasi keuangan Rp.49.999.000,- atau 100 % serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah 1 unit embung yang berlokasi di keltan Guguak Sakato Nagari Tanjung Gadang kec. Lareh Sago Halaban.
37. Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.574.090.000,- dan realisasi keuangan Rp. 1.979.640.215,- atau 76,91 % serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini



adalah 25 unit (4 unit jalan usaha tani dan 21 unit jalan produksi). Sebaran lokasi pembangunan Jalan Usaha Tani 1 (satu) unit di kelompok tani Oriza Sativa nagari Sungai Antuan Kec. Mungka, 1 (satu) Unit di keltan Subarang Bawah nagari Batu Balang kec. Harau, 1 (satu) Unit di keltan Anjalai nagari Mungo kec. Luak dan 1 (satu) unit di keltan Salendang Suto nagari Sitanang kec. Lareh Sago Halaban. Sementara untuk Jalan Produksi tersebar di beberapa lokasi seperti di 2 (dua) unit di kecamatan Gunuang Omeh (keltan Tunas Muda dan keltan Tarusan Dareh nagari Koto Tinggi), 3 (tiga) unit di kec. Bukik Barisan (keltan Kambang Payuang nagari Sungai Naning, keltan Bungo Padi nagari Banja Loweh dan keltan Sinar Harapan nagari Maek). Di kecamatan Mungka 1 (satu) unit jalan produksi di keltan Setia Mungka nagari Mungka dan kecamatan Guguak, KWT Jaya Bersama di nagari VII Koto Talago. Jalan produksi di kecamatan Lareh Sago Halaban ada 3 (tiga) unit yang tersebar di nagari Batu Payuang (keltan Maju Jaya), nagari Balai Panjang (keltan Saiyo Sakato dan di Nagari Bukik Sikumpa (keltan Cimpago). Untuk kecamatan Harau, jalan produksi dibangun di nagari Sarilamak di keltan Sanipan Saiyo. Untuk kecamatan Pangkalan, ada 2 (dua) unit jalan produksi di Nagari Pangkalan yaitu di keltan Ngalau Jaya dan keltan Simpati Jaya. Dan di kecamatan Kapur IX, jalan produksi dibangun sebanyak 6 (enam) unit yang tersebar di nagari Koto Lamo (keltan Belas Kasihan), nagari Lubuak Alai (keltan Koto Sepakat), nagari Koto Lamo (keltan Sungai Gemuruh), nagari Durian Tinggi (keltan Koto Saiyo) dan di nagari Muaro Paiti (keltan Pemuda Milenial dan KWT .Usaha Bunda).

38. Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.180.000.000,- dan realisasi keuangan Rp180.000.000,- atau 100 % serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah 1 unit bangunan RMU di kelompok Lumbuang Padi nagari Durian Tinggi kec Kapur IX.



39. Sub kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 393.149.565,- dan realisasi keuangan Rp. 393.142.300,- atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100% Keluaran dari kegiatan ini adalah Gerakan Pengendalian OPT/Penerapan PHT Tanaman Jagung di 13 Lokasi yaitu di Kelompok Tani Rancak Basamo Nagari Mungka Kec. Mungka, Kelompok Tani Tapak Jaya Nagari Situjuh Banda Dalam Kec. Situjuh Limo Nagari, Kelompok Tani KWT Puti Saiyo Nagari Situjuh Gadang Kec. Situjuh Limo Nagari, Kelompok Tani Amanah Nagari Andiang Kec. Suliki, Kelompok Tani Semoga Jaya Nagari Koto Tengah Simalanggang, Kelompok Tani Padang Selereng Nagari Sungai Naniang, Kelompok Tani Murah Hati Nagari Halaban Kec. Lareh Sago Halaban, Kelompok Tani Lereng Indah Nagari Halaban Kec. Lareh Sago Halaban, Kelompok Tani Hamparan Sungai Beringin Nagari Sariek Laweh Kec. Akabiluru, Kelompok Tani Cimpago Raya Nagari Suayan Kec. Akabiluru, Kelompok Tani Sakato Nagari Mungo Kec. Luak, Kelompok Tani KWT Usaha Bersama Nagari Sei. Kamuyang Kec. Luak, dan Kelompok Tani Hasta Karya Nagari Solok Bio-bio Kec. Harau dan Penerapan Pengendalian OPT Tanaman Tembakau di 10 Lokasi yaitu di Kelompok Tani Pambola Ruyuang Sakato Nagari Koto Tengah Kec. Bukik Barisan, kelompok tani Batang Puniak Nagari Situjuh Gadang Kec. Situjuh Limo Nagari, kelompok tani Ingin Maju Nagari Banja Loweh Kec. Bukik Barisan, kelompok tani Bukik Cawan Nagari Situjuh Banda Dalam Kec. Situjuh Limo Nagari, kelompok tani Saiyo Nagari Kubang Kec. Guguak , kelompok tani Puncak Kumbuah Nagari Sei. Naniang Kec. Bukik Barisan, Kelompok Tani Gunuang Jaya Nagari Baruah Gunuang Kec. Bukik Barisan, Kelompok Tani Tani Subur Nagari Situjuh Batua Kec. Situjuh Limo Nagari, Kelompok Tani Ngalau Indah Nagari Pandam Gadang Kec.



Gunuang Omeh dan Kelompok Tani Fajar Harapan Nagari Pandam Gadang Kec. Gunuang Omeh.

40. Sub Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 128.084.000 dan realiasi keuangan Rp. 128.084.000 atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. keluaran dari kegiatan ini adalah Penerapan Dampak Perubahan Iklim 13 Lokasi dan Penyusunan Pola Tanam di 13 Lokasi yaitu di Kelompok Tani Serumpun Kulik Manih Nagari Situjuh Ladang Laweh Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kelompok Tani Bundo Saiyo Nagari Situjuh Banda Dalam Kec. Situjuh Limo Nagari, Kelompok Tani Lereng Sago Sepakat Nagari Situjau Batua Kec. Situjuh Limo Nagari, Kelompok Tani Kayu Nan Putih Nagari Situjuh Gadang Kec. Situjuh Limo Nagari, Kelompok Tani Sago Putri Nagari Sungai Kamuyang Kec. Luak, Kelompok Tani Sopan Panjang Nagari Sariek Laweh Kec. Akabiluru, Kelompok Tani Hijau daun Nagari Baruah Gunuang Kec. Bukit Barisan, Kelompok Tani Puncak Jaya Nagari Baruah Gunuang Kec. Bukit Barisan, Kelompok Tani Andeski Nagari Baruah Gunuang Kec. Bukit Barisan, Kelompok Tani KWT Sakinah Nagari Koto Tengah Kec. Bukit Barisan, Kelompok Tani Pelita Harapan Nagari Sungai Naniang Kec. Bukit Barisan, Kelompok Tani Harapan Baru Nagari Banja Loweh Kec. Bukit Barisan dan Kelompok Tani Angin Berhembus Nagari Kubang Kec. Guguak.
41. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.990.500,- dan realisasi keuangan Rp. 20.990.500,- atau 100% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Gambir 1 Dokumen dan Temu Usaha Pengembangan Jagung 2 Kali di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota.



42. Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh di Kecamatan dan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 867.752.932,- dan realisasi keuangan Rp. 767.518.639,- atau 88,45 % serta realisasi fisik kegiatan mencapai 99,08 % Keluaran dari kegiatan ini adalah :
- a. Pelatihan Penyuluh Swadaya (IPDMIP) dilaksanakan pada tanggal 6-10 Juni 2022 di ruangan Pertemuan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dengan jumlah peserta 40 orang.
 - b. Penyediaan Tenaga Pendukung untuk Kegiatan IPDMIP. Sebanyak 12 orang Staf Lapangan Pendamping Penyuluh terbagi di semua Nagari Daerah Irigasi (DI) IPDMIP. Staf Lapangan IPDMIP bertugas mendampingi pelaksanaan Sekolah lapang (SL) dan menyiapkan segala kebutuhan untuk SL. Staf Lapangan mendapatkan Honorarium dan BOP setiap bulannya.
 - c. Pertemuan Bulanan Review Penyuluhan (IPDMIP) yang berjumlah 10 kali pertemuan dengan rincian pertemuan :
 - 1) Pertemuan 1 tanggal 8 Februari 2022 di ruang Pertemuan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Limapuluh Kota.
 - 2) Pertemuan ke 2 pada tanggal 25 Februari 2022 di ruang Pertemuan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Limapuluh Kota.
 - 3) Pertemuan ke 3 pada tanggal 10 Maret 2022 di ruang Pertemuan Ex. BP4K Tanjung Pati.
 - 4) Pertemuan ke 4 pada tanggal 1 April 2022 di ruang Pertemuan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Limapuluh Kota.
 - 5) Pertemuan ke 5 pada tanggal 24 Mei 2022 di ruang Pertemuan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Limapuluh Kota.



- 6) Pertemuan ke 6 pada tanggal 14 Juni 2022 di ruang Pertemuan Ex. BP4K Tanjung Pati.
 - 7) Pertemuan ke 7 pada tanggal 8 Juli 2022 di ruang Pertemuan Ex. BP4K Tanjung Pati.
 - 8) Pertemuan ke 8 pada tanggal 8 Agustus 2022 di ruang Pertemuan Ex. BP4K Tanjung Pati.
 - 9) Pertemuan ke 9 pada tanggal 23 September 2022 di ruang Pertemuan Rumah Makan Kapalo Banda.
 - 10) Pertemuan ke 10 pada tanggal 3 Oktober 2022 di ruang Pertemuan Ex. BP4K Tanjung Pati.
- d. Rantai Nilai (IPDMIP) 6 Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Workshop Validasi dilaksanakan 2 angkatan :
 - Angkatan I diadakan pada tanggal 11-12 Agustus 2022 di Hotel Sago Bungsu.
 - Angkatan II diadakan pada tanggal 15-16 Agustus 2022 di Ruang Pertemuan Ex. BP4K Tanjung Pati.
 - 2) Fasilitasi Rantai Nilai dilakukan 4 kali :
 - Pertemuan 1 dilaksanakan pada tanggal 29 September 2022 di Aula Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
 - Pertemuan 2 dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2022 di Hotel Sago Bungsu.
 - Pertemuan 3 dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2022 di Hotel Sago Bungsu.
 - Pertemuan 4 dilaksanakan Temu Bisnis pada tanggal 1 November 2022 ke Toko Tani Indonesia Center (TTIC) Padang.
 - 3) Workshop Kajian Rantai Nilai dilaksanakan 2 kali pertemuan yang di adakan pada tanggal 10 November dan



tanggal 11 November 2022 di Hotel Sago Bungsu Tanjung Pati.

- e. Pendampingan Rantai Nilai di 2 Kecamatan :
 - 1) Kecamatan Lareh Sago Halaban pada 7 September 2022, 14 Oktober 2022, 27 Oktober 2022, 4 November 2022 dan 14 November 2022.
 - 2) Kecamatan Luak pada 7 September 2022, 14 Oktober 2022, 27 Oktober 2022, 4 November 2022 dan 14 November 2022.
- f. Sekolah Bisnis dilaksanakan 2 Angkatan pada tanggal 23, 24, 25, 28, dan 29 November 2022 di Hotel Sago Bungsu Tanjung Pati.

43. Sub kegiatan Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 730.741.900,- dan realisasi keuangan Rp. 633.714.979,- atau 86,72 % serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100% Keluaran dari kegiatan ini adalah :

- a. Forum Berbagi Pengalaman Antar Petani (IPDMIP) dilakukan sebanyak 2 unit yakni 1 unit di Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi pada 2 daerah irigasi dan 1 unit di daerah Irigasi Kewenangan kabupaten pada 8 daerah Irigasi.

Adapun rincian pelaksanaan kegiatan :

- 1) Forum Berbagi Antar Petani di Daerah Irigasi (DI) Batang Tabik dilaksanakan di KWT. Taruko Nagari Mungo Kecamatan Luak.
- 2) Forum Berbagi Antar Petani di Daerah Irigasi (DI) Batang Lampasi dilaksanakan di Kelompok Tani Berkat Yakin Nagari Piobang Kecamatan Payakumbuh pada tanggal 20 Juli 2022.



- 3) Forum Berbagi Antar Petani di Daerah Irigasi (DI) Titi Ampera dilaksanakan di Kelompok Tani Palito Hati Nagari Batu Hampar Kecamatan Akabiluru pada tanggal 1 Agustus 2022.
 - 4) Forum Berbagi Antar Petani di Daerah Irigasi (DI) Batang Mungo dilaksanakan di Kelompok Tani Hamparan Pulau Nagari Taram Kecamatan Harau pada tanggal 4 Agustus 2022.
 - 5) Forum Berbagi Antar Petani di Daerah Irigasi (DI) Batang Sanipan dilaksanakan di Kelompok Tani Kulin Jaya Nagari Sarilamak Kecamatan Harau pada tanggal 4 Agustus 2022.
 - 6) Forum Berbagi Antar Petani di Daerah Irigasi (DI) Tanjung Betaut dilaksanakan di Kelompok Tani Toluak Saiyo Nagari Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak pada tanggal 26 Juli 2022.
 - 7) Forum Berbagi Antar Petani di Daerah Irigasi (DI) Batang Liki dilaksanakan di Kelompok Tani Jaya Bersama Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki pada tanggal 26 Juli 2022.
 - 8) Forum Berbagi Antar Petani di Daerah Irigasi (DI) Lurah Buluh Nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban.
 - 9) Forum Berbagi Antar Petani di Daerah Irigasi (DI) Batang Coran Nagari Sitanang Kecamatan Lareh Sago Halaban.
 - 10) Forum Berbagi Antar Petani di Daerah Irigasi (DI) Banda Baliak Sariak Nagari Ampalu Kecamatan Lareh Sago Halaban.
- b. Konstratani (DAK-Non Fisik)
- Kegiatan Konstratani dilaksanakan pada 13 Kecamatan. Adapun rincian kegiatan Konstratani sebagai berikut :
- 1) Paket data internet pada 13 Kecamatan
 - 2) Pelatihan petani tematik pada 13 Kecamatan
- c. Kunjungan Antar Desa per Kecamatan (IPDMIP) sebanyak 2 unit. 1 unit di wilayah Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi dan 1



unit di Daerah irigasi Kewenangan Kabupaten. Kunjungan Lintas Desa dilaksanakan pada 7 Kecamatan.

- 1) Kunjungan Lintas Desa dari Kecamatan Mungka ke Daerah Irigasi Titi Ampera pada Kelompok Tani Mitra Mandiri Nagari Batu Hampar.
 - 2) Kunjungan Lintas Desa dari Kecamatan Situjuh Limo Nagari ke Daerah Irigasi Nagari Sitanang
 - 3) Kunjungan Lintas Desa dari Kecamatan Kapur IX ke Daerah Irigasi Batang Mungo pada Kelompok Tani Hamparan Pulau Nagari Taram
 - 4) Kunjungan Lintas Desa dari Kecamatan Pangkalan ke Daerah Irigasi Batang Lampasi pada Kelompok Tani Berkat Yakin Nagari Piobang
 - 5) Kunjungan Lintas Desa dari Kecamatan Gunuang Omeh ke Daerah Irigasi Batang Liki pada Kelompok Tani Jaya Sepakat Nagari Sungai Rimbang
 - 6) Kunjungan Lintas Desa dari kecamatan Bukik Barisan ke daerah Irigasi Tanjung Betaut Nagari Guguak VIII Koto
 - 7) Kunjungan Lintas Desa dari kecamatan Lareh Sago Halaban ke Daerah Irigasi Batang Tabik pada Kelompok Tani Pantai Cermin Nagari Mungo
- d. Penghargaan untuk Penyuluh (IPDMIP) : Kegiatan ini dilaksanakan pada 7 Kecamatan IPDMIP.
- Adapun yang menerima penghargaan petani berprestasi sebagai berikut :
- 1) Elfa Susanti Nagari Batu Ampa
 - 2) Zul Ariesman Nagari Koto Tengah Batu Hampa
 - 3) Yesi Rizanti Nagari Sungai Rimbang
 - 4) Hendra Nagari Piobang
 - 5) Novida Nagari Sungai Beringin
 - 6) Rena Helena Nagari Sarilamak
 - 7) Fitra Andalia Nagari Taram



- 8) Darmawira Nagari Nagari Balai Panjang
 - 9) Ratna Defita Nagari Sitanang
 - 10) Deti Yasni Nagari Ampalu
 - 11) Lidia Rahma Fitri nagari Sungai Kamuyang
 - 12) Meli Susanti Nagari Mungo
- e. Penghargaan untuk Penyuluh (IPDMIP) : Kegiatan ini dilaksanakan pada 7 Kecamatan IPDMIP.
Adapun yang menerima penghargaan penyuluh berprestasi sebagai berikut :
- 1) Prima Gustia, SP : Penyuluh Pertanian Nagari Piobang
 - 2) Meinina Roza, S.Pt : Penyuluh Pertanian Nagari Sungai Rimbang
 - 3) Yulia Fitri, S.ST : Penyuluh Pertanian Nagari Batu Hampa
 - 4) Hidayati, A.Md : Penyuluh Pertanian Nagari Mungo
 - 5) Buchi Afriyogi : Penyuluh Pertanian Nagari Guguak VIII Koto
 - 6) Yanti Yulianti : Penyuluh Pertanian Nagari Sitanang
44. Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.662.052.268,- dan realisasi keuangan Rp. 540.093.456,- atau 32,50% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 34, 85 % Keluaran dari kegiatan ini adalah :
- a. Demonstrasi Alsintan (IPDMIP) dilaksanakan sebanyak 2 kali di Nagari Piobang Kecamatan Payakumbuh di 2 lokasi di bagi untuk Kewenangan Provinsi dan Kabupaten.
 - b. Demonstrasi Equipment (IPDMIP) : Diberikan berupa Alat Mesin Pertanian Chopper (Alat Pencacah Multifungsi) sebanyak 20 Unit di Lokai 7 Kecamatan Daerah Pelaksana Kegiatan IPDMIP. Masing Daerah Irigasi (DI) mendapatkan 2 Unit Chopper.
 - c. Pembangunan Tenaga Pendukung dan Rehabilitasi BPP Kecamatan (DAK) : sebanyak 2 Unit untuk BPP Kecamatan Kapur IX dan Kecamatan Lareh Sago Halaban. Tetapi tidak



dapat direalisasikan karena Tidak bisa dilaksanakan pekerjaan karena telah berakhirnya batas waktu input aplikasi OMSPAM pada tanggal 21 Juli 2022, sehingga hanya bisa direalisasikan kegiatan yang telah di setujui APIP saja yakni pembelian 2 Unit Ampli dan 2 Unit Infocus.

45. Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.295.974.400,- dan realisasi keuangan Rp. 3.133.929.900,- atau 94,48% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100% Keluaran dari kegiatan ini adalah :

- a. Bimbingan Teknis untuk Sekolah Lapang Bawang Merah untuk 1 Kelompok Tani Suka Damai Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki. Bantuan yang di berikan berupa Bibit Bawang Merah, Kapur Dolomit, Mulsa Plastik, Pupuk Kompos, Pupuk NPK dan Baju Kaos Lapangan. Pertemuan dilaksanakan 2 kali pertemuan dengan jumlah peserta 20 orang/pertemuan.
- b. Sekolah Lapang IPDMIP:

Sekolah lapangan bertujuan untuk :

- 1) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam melakukan kegiatan budidaya dan pengelolaan usaha tani;
- 2) Meningkatkan kemampuan dan kesadaran petani dalam memanfaatkan lahan usaha taninya secara produktif;
- 3) Meningkatkan kepercayaan diri petani dalam mengadopsi praktek-praktek;
- 4) Membangun kemandirian petani dalam pengelolaan proses pembelajaran diri, oleh, dan untuk petani.

- a) Sekolah Lapang dibagi 2 musim. Sekolah Lapang IPDMIP terdiri dari SL Padi, SL Penangkar dan SL Jagung. Musim I dilaksanakan pada bulan April s/d Juli 2022 pada 10 Daerah Irigasi terdiri dari 48 kelompok tani sedangkan Musim II dilaksanakan pada bulan Agustus



s/d November 2022 pada 10 Daerah Irigasi terdiri dari 35 kelompok tani melaksanakan SL Padi.

- b) Hasil/Outcome
 - Produktivitas padi di daerah irigasi lokasi proyek meningkat,;
 - Intensitas tanam di daerah irigasi lokasi proyek meningkat,
- c) Peserta
 - Peserta sekolah lapangan adalah penerima manfaat prioritas dari proyek (rumah tangga miskin, petani kecil, kaum perempuan, dan petani muda) yang ada di sekitar Daerah irigasi di kabupaten Lima Puluh Kota,
 - Setiap siklus SL dilaksanakan selama 12 kali pertemuan dengan setiap pertemuan dilaksanakan selama setengah hari dimulai jam 08.30 s/d selesai WIB
 - SL dilaksanakan di lahan usahatani petani penerima manfaat proyek
- d) Metode
 - Identifikasi masalah dan kendala yang dihadapi para petani dalam pengelolaan usahatannya
 - Penetapan materi pembelajaran SL secara partisipatif antara pemandu dan petani penerima manfaat proyek, mencakup materi-materi yang relevan dalam satu siklus budidaya padi, mulai dari persiapan tanam sampai pasca panen, baik aspek teknis, pembiayaan, pengelolaan air, dan pasca panen
 - Penetapan jadwal untuk 12 kali pertemuan pembelajaran SL
 - Pelaksanaan pertemuan pembelajaran SL sebanyak 12 kali untuk setiap siklus SL
 - Penyusunan laporan pelaksanaan SL



- c. Sekolah Lapang Program Unggulan Jagung sebanyak 26 Kelompok. Bantuan yang di berikan berupa Benih Jagung Phioneer 32, Kapur Dolomit, Urea, Pupuk Kompos dan Pupuk NPK. Pertemuan dilaksanakan 5 kali pertemuan/Kelompok dengan jumlah peserta 20 orang/pertemuan.

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2023 dengan Total Belanja APBD sebesar Rp. **20.248.130.331,-** terurai dalam 6 program dan 16 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 %.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 – 2026, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan nilai tambah sektor pertanian terhadap PDRB dalam harga berlaku	Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan 3% per tahun	Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	1. Pengawasan penggunaan sarana pertanian 2. Pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme kewenangan kabupaten/kota.



*Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Lima puluh Kota*

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	1. Pengembangan prasarana pertanian 2. Pembangunan prasarana pertanian
		Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	1. Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota
		Perizinan usaha pertanian	1. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota
		Penyuluhan pertanian	Pelaksanaan penyuluhan pertanian



*Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Lima puluh Kota*

Tabel TC-29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Lima Puluh Kota

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 202	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PERSENTASE PENINGKATAN SARANA PERTANIAN YANG BERKUALITAS	55%	48%	50%	0	0	50%	100%	100%
	PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN	PENGAWASAN PEMANFAATAN PUPUK, PESTISIDA DAN ALSINTAN	13 kec	13 Kec	13 Kecamatan	13 Kecamatan	100	13 Kec	100%	100%
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Pengawasan Pemanfaatan Pupuk dan Pestisida	13 Kec	13 Kec	13 Kecamatan	13 Kecamatan	100	13 Kec	100%	100%
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Pengawasan Pemanfaatan Alsintan	13 Kec	13 Kec	13 Kecamatan	13 Kecamatan	100	13 Kec	100%	100%
	PENGELOLAAN SUMBER DAYA GENETIK (SDG) HEWAN,	PENGELOLAAN SDG	7 komoditi	6 Komoditi	7 Komoditi	5 komoditi	71	9 Komoditi	128%	128%



**Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Lima puluh Kota**

	TUMBUHAN, DAN MIKRO ORGANISME KEWENANGAN KABUPATEN KOTA									
	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Pemurnian (pendaftaran varietas) benih tanhortbun	1 varietas	2 Komoditi	1 Komoditi	1 komoditi	100	4 Komoditi	400%	400%
	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Penyediaan benih tanhortbun	7 komoditi	6 Komoditi	6 Komoditi	4 komoditi	66	6 Komoditi	100%	100%
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	PERSENTASE PENYEDIAAN PRASARANA PERTANIAN YANG BERKUALITAS	72%	68%	70%	0	0	100%	100%	100%
	PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	MASTERPLAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	100	1 Dokumen	100%	100%
	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Pengawasan pelaksanaan Perda LP2B	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	100%	100%
	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Masterplan pengembangan prasarana, sarana, kawasan, dan komoditas perkebunan	1 dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	100%	100%
	PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN	PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN	52 unit	37 Unit	29 Unit	38 unit	130	41 Unit	141%	141%
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tingkat usaha tani	13 unit	2 Unit	5 unit	11 unit	220	6 Unit	120%	120%
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan embung pertanian	6 unit	4 Unit	5 Unit	1 unit	20	6 Unit	120%	120%
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani	25 unit	3 Unit	7 Unit	25 unit	350	19 Unit	271%	271%



**Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Lima puluh Kota**

	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Dam Parit	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan dam parit pertanian	4 unit	4 Unit	4 Unit	0	0	6 Unit	150%	150%
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan balai penyuluh	1 unit	0	3 Unit	0	0	2 Unit	66,66%	66,66%
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya	3 unit	24 Unit	5 Unit	1 unit	20	2 Unit	40%	40%
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	PERSENTASE FASILITASI PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN YANG BERKUALITAS	80%	80%	80%	80%	100	80%	80%	100%
	PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN KABUPATEN/KOTA	FASILITASI PENGENDALIAN OPT DAN PENGENDALIAN/PENANGGULANGAN BENCANA	6 komoditi	2 Komoditi	50 Lokasi	36	72	50 Lokasi	100%	100%
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah gerakan pengendalian OPT	23 lokasi	3 Lokasi	24 Lokasi	23 lokasi	96	24 Lokasi	100%	100%
	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Penerapan Dampak Perubahan Iklim (PDPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	26 lokasi	0	26 Lokasi	13 lokasi	50	26 Lokasi	100%	100%
	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Cadangan benih padi untuk bencana alam	2000 Kg	600 Kg	2000 Kg	0	0	2005 Kg	100%	100%
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	PERSENTASE PENERBITAN REKOMENDASI IZIN USAHA PERTANIAN	100%	0%	100%	1,7%	1.7	100%	100%	100%
	PENERBITAN IZIN USAHA	JUMLAH PENYUSUNAN, PENILAIAN,	56 dokumen	0	56	1	1.7	36 Dokumen	64%	64%



**Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Lima puluh Kota**

PERTANIAN YANG KEGIATAN USAHANYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	PEMBINAAN IZIN USAHA PERTANIAN			Dokumen	dokumen					
Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Jumlah penyusunan standar pelayanan publik pemberian izin usaha pertanian	3 dokumen	0	3 Dokumen	0	0	3 Dokumen	100%	100%	
Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian	2 dokumen	0	2 Dokumen	0	0	2 Dokumen	100%	100%	
Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian dan Masyarakat Peduli Indikasi Geografis (MPIG) Gambir	51 dokumen	0	51 Dokumen	1 dokumen	1.7	31 Dokumen	60%	60%	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	PENINGKATAN KELAS KELOMPOK TANI	6 %	3%	4%	5,1%	127	100%	100%	100%	
PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN	PENINGKATAN KELAS KELOMPOK TANI	26 kelompok tani	48	72Kelompok Tani	91 kelompok tani	126	26 Kelompok Tani	100%	100%	
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Peningkatan kelas BPP	2 BPP	1 Unit	2 Unit	0 unit	0	2 Unit	100%	100%	
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelompok yang terfasilitasi	96 kelompok tani	11 Kelompok	160 Kelompok	110 kelompok tani	68	360 Kelompok	225 %	225%	
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Peningkatan kelas BPP	2 BPP (6 unit)	4 Unit	322 Unit	20 unit	6,2	85 Unit	26%	26%	
Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Sekolah Lapang Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	80 keltan	0	120 Keltan	110 kelompok tani	92	30 Keltan	25 %	25 %	



II.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 66); Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional, Jabatan Struktural dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT). Jabatan Struktural di bawah Kepala Dinas terdiri atas satu orang Sekretaris dan empat (4) orang Kepala Bidang, yaitu a). Bidang Tanaman Pangan, b). Bidang Sarana, Prasarana, Perizinan dan Penyuluhan, c). Bidang Tanaman Perkebunan, d). Bidang Tanaman Hortikultura. Masing-masing Bidang terbagi lagi atas tiga seksi sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta tugas pembantuan.

Adapun fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.



Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK (IKD dalam RPJMD)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Persentase peningkatan produksi tanaman Pangan Hortikultura dan perkebunan		Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar	4,58	4,78	4,98	5,18	4,32	4,43	4,51	5,18	

Tabel. Penghitungan Produksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

Komoditi	2020	2021	2022	Peningkatan tahun 2021	Peningkatan tahun 2022
Padi	267.971,50	232.018,75	228.015,60	-13.42	-1.73
Jagung	45.511,78	37.906,26	50.277,78	-16.71	32.64
Jeruk	58.193,00	38.368,00	31.323,39	-34.07	-18.36
Cabe Besar	19.819,00	8.322,00	10.498,28	-58.01	26.15
Gambir	7.827,00	7.845,89	7.776,42	0.24	-0.89
Kopi	422,29	380,87	418,76	-9.81	9.95
Rata-Rata				-21.96	7.96

Peningkatan produksi jagung pada tahun 2022 diakibatkan oleh pelaksanaan Program Unggulan Daerah *Pengembangan jagung 20.000 Ha*. Pada tahun 2022 dialokasikan anggaran 1,3 M untuk program pengembangan jagung yang berupa penyusunan action plan, pelatihan, bantuan sarana produksi, temu usaha dan lain lain. Akibat dari masivnya pengembangan jagung, mengakibatkan produksi komoditi lain terdampak, seperti padi yang menurun produksinya ditahun 2022. Menurunnya produksi jeruk dikarenakan adanya serangan OPT jeruk ditahun 2022.



II.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH / DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

II.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Hal Kritis yang Terkait dengan Pelayanan Perangkat Daerah

Kabupaten Lima Puluh Kota menetapkan visi: **“Mewujudkan Lima Puluh Kota yang Madani, Beradat, dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.”**

Pada Visi Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat 3 (tiga) kata kunci, yaitu **Madani** adalah Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota yang harmonis, demokratis, menjunjung tinggi etika, moralitas, transparansi, toleransi, sederhana, sinkron, integral, emansipasi, beradat, maju dan modern dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. **Beradat dan Berbudaya** adalah Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota santun bertutur kata, sopan dalam berperilaku sesuai dengan adat istiadat dan budaya yang ada, mengekspresikan dan menghargai nilai-nilai adat budaya dalam kehidupan bermasyarakat luas. **Nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah** adalah unsur pemerintah, lembaga, organisasi dan masyarakat bersama-sama mewujudkan pemahaman dan pengalaman nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau dalam setiap aktivitas kehidupan yang berlandaskan kepada ajaran agama Islam

Upaya untuk mewujudkan visi menjadi daerah yang Madani, Beradat, dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah yang telah dirumuskan diatas adalah melalui 5 Misi Pembangunan Daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan nilai-nilai keagamaan
2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan Ekonomi Lintas Sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional
3. Mendorong potensi nagari dalam pembangunan daerah
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi



5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan berkelanjutan

Untuk mewujudkan misi tersebut dituangkan kedalam 5 agenda prioritas pembangunan antara lain :

1. Pengembangan masyarakat madani
2. Peningkatan pembangunan IKK Sarilamak
3. Pariwisata dan peningkatan ekonomi masyarakat
4. Pengembangan pertanian dan perikanan menuju agribisnis
5. Peningkatan pembangunan insfrastruktur daerah

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki fungsi penyelenggaraan, pembinaan dan pelaksanaan urusan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Dalam Mendukung pelaksanaan misi II, yaitu “Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional” melalui agenda prioritas pengembangan pertanian dan perikanan menuju agribisnis, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota turut berperan dalam mensukseskan pencapaian Tujuan Meningkatnya Pertumbuhan dan Perkembangan ekonomi Masyarakat dengan sasaran Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan

II.3.2. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan dan hambatan yang ditemui dalam pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Daerah antara lain adalah kebijakan anggaran yang membatasi luasan kegiatan, Sarana dan prasarana aparatur dalam pelaksanaan tugasnya, jumlah aparatur (ASN) yang mengalami stagnansi kaderisasi karena tidak adanya penerimaan pegawai baru, sementara aparatur yang memasuki masa purna bakti kian bertambah, dan permasalahan lainnya yang harus disikapi dengan bijak demi tercapainya Visi Daerah.



Penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus; dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 mengakibatkan pergeseran anggaran dan penyesuaian arah bentuk kegiatan di tahun 2023. Kondisi Keuangan daerah yang minim mengakibatkan alokasi anggaran untuk mendukung program unggulan daerah tidak terpenuhi, diperkirakan untuk tahun 2024 tidak jauh berbeda.

Permasalahan dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota dipetakan dalam table berikut :

Tabel. T-B. 35
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Pertanian

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Produksi dan Produktivitas Pertanian di Kabupten Lima Puluh Kota masih belum maksimal	a. Ketersediaan Sarana Pertanian (Pupuk, Pestisida, Alsintan) yang belum memadai bagi Kebutuhan Petani di Kabupaten Lima Puluh Kota	<ul style="list-style-type: none">- Distribusi pupuk bersubsidi tidak mencukupi kebutuhan petani- Pemanfaatan Alat Mesin Pertanian oleh petani di Kabupaten Lima Puluh Kota masih rendah- Pemakaian Benih berlabel/ bermutu masih belum merata- Potensi varietas local bermutu belum dikelola maksimal
		b. Penyediaan Prasarana Pertanian masih belum memadai	<ul style="list-style-type: none">- Belum ada nya cetak biru Pengembangan pertanian- Prasarana Irigasi pertanian masih belum mencukupi- Prasarana Jalan Pertanian masih Belum memadai bagi transportasi saprodi dan hasil pertanian- Prasarana Pertanian lainnya seperti BPP Kecamatan, UPTD Benih, perlu dipelihara dan dikembangkan,
		c. Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan daerah yang rawan bencana alam dan serangan OPT	<ul style="list-style-type: none">- Serangan OPT yang tidak mampu dikendalikan petani secara mandiri- Rendahnya Kemampuan berusaha Kembali bagi petani dalam kondisi pasca bencana alam



			<ul style="list-style-type: none"> - Pemahaman petani dalam pemakaian Pestisida dan pertanian ramah lingkungan masih rendah - Penerapan usaha tani adaptif iklim masih rendah
		d. Pembinaan dan pengawalan perizinan usaha pertanian masih rendah	<ul style="list-style-type: none"> - Standar Pelayanan Perizinan Usaha Pertanian belum ada - Pelaksanaan Pembinaan dan Perizinan Usaha Pertanian masih belum maksimal
		e. SDM dan Sarana Penyuluhan dan Petani perlu ditingkatkan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan dan penilaian bagi penyuluh masih belum maksimal - Pelatihan dan Pembinaan kelompok tani masih perlu ditingkatkan - Sarana dan Prasarana Penyuluhan perlu dipelihara dan ditingkatkan

II.3.3. Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap Capaian Program Nasional/Internasional

Dampak dari Penerapan Kemendagri nomor 050-5889 ini mengharuskan dilakukan penyesuaian indikator yang sudah ada sebelumnya sesuai dengan indikator yang ditetapkan dalam kepmendagri tersebut. Hal ini mempengaruhi terhadap bentuk dan strategi pelaksanaan sub kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya, namun diupayakan semaksimal mungkin tidak memberikan pengaruh yang negatif terhadap pencapaian visi dan misi Daerah.

II.3.4. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam peningkatan pelayanan perangkat daerah terdapat beberapa tantangan, antara lain keterbatasan jumlah aparatur Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan perkebunan baik di Kantor maupun dilapangan. Hal ini disebabkan karena tidak seimbang nya penerimaan pegawai baru dengan jumlah ASN yang memasuki masa purna bakti maupun mutasi. Fasilitas sarana dan prasarana kantor juga perlu ditingkatkan, mengingat kita sudah



berada di era teknologi 4.0 yang sangat bergantung pada teknologi informasi dan jaringan, sementara kemampuan daerah menjadi pembatas dalam upaya pemeliharaan dan peningkatan jumlah maupun kualitas sarana dan prasarana perkantoran.

Program Unggulan Daerah berupa Pengembangan Lahan jagung seluas 20.000 Ha merupakan tantangan bagi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan. Saat ini tercatat sekitar 3000-an hektar lahan jagung dikabupaten Lima Puluh Kota, yang berarti ada tantangan untuk membuka lahan jagung 6 kali lipat dari lahan jagung yang sudah ada dalam 5 tahun ini.

Pengembangan Lahan Jagung 20.000 Ha di Kabupaten Lima Puluh Kota dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu Penyiapan penyediaan lahan jagung 20.000 Ha, Peningkatan produksi jagung, dan Fasilitasi Kerja Sama antara Investor dan Pemilik Lahan. Karena kondisi keuangan daerah akhir akhir ini mengakibatkan tahap Penyiapan penyediaan lahan jagung belum terlaksana maksimal. Kedepannya, fasilitasi Kerja Sama antara Investor dan Pemilik Lahan menjadi tantangan dan peluang dalam mencapai Pengembangan Lahan Jagung 20.000 Ha di Kabupaten Lima Puluh Kota.

II.3.5. Formulasi Isu-Isu Penting berupa Rekomendasi dan Catatan yang Strategis untuk Ditindaklanjuti dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun yang Direncanakan

Dari gambaran permasalahan, kendala, tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan dapat diformulasikan bahwa dalam Pencapaian sasaran “Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Pertanian dan Perikanan” Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan perkebunan meletakkan peningkatan produksi bagi 6 komoditi tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama Dinas, yaitu padi, jagung, cabe, jeruk, kopi dan dan gambir. Peningkatan produksi bagi 6 komoditi ini akan dicapai melalui rangkaian program dan kegiatan yang disusun dalam rencana strategis dinas,



disamping itu melalui zonasi komoditi diharapkan dapat dikembangkan komoditi sesuai dengan kebutuhan/kecocokan lingkungan bagi tanaman untuk memproduksi secara maksimal.

II.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dalam Penyusunan Renja ini, terdapat beberapa penyesuaian dan penyempurnaan terhadap Rancangan Awal RKPD. Penyempurnaan terus dilakukan seiring dengan masukan, informasi dan rekomendasi dari hasil pembahasan TAPD, dewan dan Petunjuk dari Pusat mengenai pengelolaan kegiatan dari Dana Alokasi Khusus, Bagi Hasil, dan sebagainya.

Rancangan awal RKPD disusun dengan mepedomani analisis kebutuhan, namun tidak dapat dipungkiri harus dilakukan banyak penyesuaian terhadap realita dan tuntutan yang berkembang.

Catatan yang perlu disikapi terhadap rancangan awal RKPD yaitu:

- a. Program Unggulan daerah, berupa pengembangan 20.000 Ha lahan jagung. Tahun 2024 merupakan tahun ketiga dalam program pengembangan jagung 20.000 Ha ini. Pada tahun 2022 diperoleh fasiltasi pendanaan untuk penyusunan Masterplan pengembangan jagung dan pelaksanaan Sekolah Lapang Jagung di 13 Kecamatan dengan Total anggaran Rp. 1.300.000.000,-. namun pada tahun 2023 tidak ada alokasi anggaran untuk program unggulan daerah, demikian juga untuk tahun 2024.
- b. Penerapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah mengakibatkan harus dilakukan penyesuaian indikator, bentuk kegiatan dan strategi pencapaian tujuan dan sasaran, dan rancangan awal RKPD.



**Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Lima puluh Kota**

**Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun
Kabupaten Lima Puluh Kota**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	25.354.500,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	12.844.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	14.609.300	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	8.777.500	



**Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Lima puluh Kota**

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	15.281.200	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	9.647.700	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	9.773.600	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	3.481.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	9.974.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	3.781.000	



**Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Lima puluh Kota**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	77.946.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	21.260.700	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	204.041.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	74.547.400	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	170 Orang	16.015.903.008	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	170 Orang	11.992.784.739	



**Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Lima puluh Kota**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	15.381.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	11.813.300	
	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindakan Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	5.490.100	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindakan Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	1.760.400	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	19.999.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	2.340.400	



**Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Lima puluh Kota**

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	3.967.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	1.114.400	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	4.498.500	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.641.400	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	15.998.500	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	3.980.000	
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah											
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 dokumen	4.493.000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 dokumen	730.000	



**Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Lima puluh Kota**

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen	18.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 dokumen	0.00	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	15 dokumen	22.800.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 dokumen	0.00	
	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	165 dokumen	30.650.000	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	165 dokumen	21.595.000	



**Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Lima puluh Kota**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Pemindahan Tugas ASN		Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	5 Orang	950.000	Pemindahan Tugas ASN		Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	0 Orang	0.00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	11.400.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0.00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					Administrasi Umum Perangkat Daerah					
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Komponen	1 Paket	23.570.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Komponen	1 Paket	9.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	23.124.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	10.300.000	



**Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Lima puluh Kota**

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	104.024.400	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	72.040.400	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	96.149.900	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	24.812.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	230 Laporan	23.975.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	230 Laporan	7.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	380.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	196.280.000	



**Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Lima puluh Kota**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	80.100.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0.00	
	Pengadaan Mebel	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	70.000.000	Pengadaan Mebel	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0.00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	132.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0.00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	15.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.000.000	



**Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Lima puluh Kota**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	19 Laporan	165.710.000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	19 Laporan	155.100.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantior	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	39 Laporan	612.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantior	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	39 Laporan	327.600.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	172 Unit	378.496.800	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	172 Unit	222.750.000	



**Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Lima puluh Kota**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	39 Unit	19.600.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	39 Unit	48.100.000		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19 Unit	60.500.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19 Unit	67.545.997		
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian						Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian						
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	12 Laporan	2.999.999.500	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan	811.187.000		



**Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Lima puluh Kota**

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12 Laporan	16.000.000.000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	8.000.000	
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota					Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota						
	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	2 VUB	212.975.000	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	1 VUB	8.000.000	
	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	3 Dokumen	8.166.735.000	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	0 Dokumen	0.00	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						
Pengembangan Prasarana Pertanian					Pengembangan Prasarana Pertanian						
	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Kabupaten Lima Puluh Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	1 Dokumen	187.000.000	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Kabupaten Lima Puluh Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	1 Dokumen	26.000.000	



**Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Lima puluh Kota**

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Kabupaten Lima Puluh Kota	Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	1 Dokumen	400.000.000	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	0 Dokumen	0.00	
	Pembangunan Prasarana Pertanian										
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	23 Unit	5.367.600.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Direhabilitasi	0 Unit	0.00	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	6 Unit	830.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	0.00	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	25 Unit	2.700.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	0.00	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Unit	425.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	0.00	



**Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Lima puluh Kota**

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit	620.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	0.00	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit	920.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	0.00	
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota					Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota					
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	14 Ha	315.000.000	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	14 Ha	8.000.000	



**Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Lima puluh Kota**

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	13 Ha	128.084.000	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	13 Ha	8.000.000	
	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 Laporan	147.000.000	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan	0 Laporan	0.00	
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					
	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota					Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota					
	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Kabupaten Lima Puluh Kota	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	3 Dokumen	60.000.000	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Kabupaten Lima Puluh Kota	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	0 Dokumen	0.00	
	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	2 Dokumen	20.000.000	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	0 Dokumen	0.00	



**Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Lima puluh Kota**

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	26 Laporan	45.000.0000	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	26 Laporan	8.000.000	
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian					Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian					
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	8 Unit	1.522.530.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	13 Unit	149.500.000	
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	53 Unit	1.211.960.000	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 Unit	0.00	



**Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Lima puluh Kota**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	13 Unit	700.000.000	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	0 Unit	0.00	
	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	29 Unit	1.760.000.000	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	119 Unit	5.527.844.900	



II.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Masyarakat mengajukan usulan melalui musrenbang yang dilaksanakan bertahap dari tingkat Nagari, Kecamatan hingga kabupaten. Hasil musrenbang kabupaten selanjutnya diverifikasi oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan skala prioritas dan aturan yang berlaku melalui SIPD. Secara umum usulan dari Nagari banyak yang gugur karena usulan tidak jelas, baik bentuk bantuan yang diminta, jumlah bantuan maupun usulan pelaksana/ penerimaan bantuan.

TC-32

**Usulan Pokir dan Musrenbang Kabupaten Lima Puluh Kota
Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan**

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Volume	Catatan
1	PROGRAM : PENYULUHAN PERTANIAN	Nagari Sarilamak, Kab. Lima Puluh Kota	Pelatihan Pengembangan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	1 Unit	Alfian (Pokir)
2	Kegiatan : Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Mungka, Kab. Lima Puluh Kota	Pelatihan Pengembangan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	2 Unit	H. Yos Sariadi, S.Ag (Pokir)
3	Sub Kegiatan : Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Kec. Harau, Kab. Lima Puluh Kota	Sekolah Lapangan (SL) Iklim Tanaman Padi dan Palawija	1 Paket	Hj. Zuhatri (Pokir)
4		Kec. Kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota	Sekolah Lapangan (SL) Iklim Tanaman Padi dan Palawija	1 Paket	Gusti Randa (Pokir)
5		Kec. Akabiluru, Kab. Lima Puluh Kota	Sekolah Lapangan (SL) Iklim Tanaman Padi dan Palawija	1 Paket	Arsi Medes (Pokir)
6		Kec. Luak Kab. Lima Puluh Kota	Sekolah Lapangan (SL) Iklim Tanaman Padi dan Palawija	1 Paket	Drs. Epi Suardi (Pokir)
7		Nagari Durian Tinggi, Kab. Lima Puluh Kota	Pelatihan Pengembangan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	1 Unit	Eko Susmadi, A.Md (Murenbang)
8		Nagari Taeh Baruah, Kab.	Pelatihan Pengembangan	1 Unit	Indra Mulyadi, S.Pd



*Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Lima puluh Kota*

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Volume	Catatan
		Lima Puluh Kota	Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan		(Musrenbang)
9		Dusun Nan Duo, Simpang Abu, Sopan, Simpang Goduang, Lobuah Tunggang, Balai Tampuak Pinang, Koto Tinggi dan Kubang Balambak	Pelatihan Pengembangan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	1 Unit	Felliadi (Musrenbang)
10		Nagari Labuah Gunuang, Kab. Lima Puluh Kota	Pelatihan Pengembangan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	1 Unit	Khairul Hadi Dt. Paduko Marajo Lelo (Musrenbang)
11		Jorong Panang, Kab. Lima Puluh Kota	Pelatihan Pengembangan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	1 Unit	Andi Altoni (Musrenbang)
12		Nagari Sungai Naniang, Kab. Lima Puluh Kota	Sekolah Lapangan (SL) Pengendalian Hama Terpadu (PHT) Tanaman Padi dan Palawija	1 Unit	Penyul Hasni (Musrenbang)
13		Nagari Tujuh Koto Talago, Kab. Lima Puluh Kota	Sekolah Lapangan (SL) Pengendalian Hama Terpadu (PHT) Tanaman Padi dan Palawija	1 Unit	Yon Hendri, S.S (Musrenbang)
14		Jorong Balai Gadang Ateh	Sekolah Lapangan (SL) Pengendalian Hama Terpadu (PHT) Tanaman Padi dan Palawija	1 Unit	Muhammad Suhardi, S.Pi (Musrenbang)
15		Nagari Sungai Beringin, Kab. Lima Puluh Kota	Sekolah Lapangan (SL) Pengendalian Hama Terpadu (PHT) Tanaman Padi dan Palawija	1 Unit	Lukman Hakim, S.Sos (Musrenbang)
16		Nagari Talang Anau, Kec. Gunuang Omeh, Kab. Lima Puluh Kota	Sekolah Lapangan (SL) Pengendalian Hama Terpadu (PHT) Tanaman Padi dan Palawija	1 Unit	Nusda Anandes (Musrenbang)
17		Nagari Batu Balang, Kab. Lima Puluh Kota	Sekolah Lapangan (SL) Pengendalian Hama Terpadu (PHT) Tanaman Padi dan	1 Unit	Dasril Sofyadi (Musrenbang)



*Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Lima puluh Kota*

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Volume	Catatan
18		Jorong Bawah, Nagari Sungai Balantiak, Kab. Lima Puluh Kota	Palawija Pembangunan Jalan Produksi Pertanian	200 meter	Drs. H. Dedi Henidal, MM (Musrenbang)



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1. TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan permasalahan, prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan pertanian di daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari semua prioritas dan program pembangunan yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2021-2026, sasaran utama pembangunan nasional yang harus dicapai antara lain pencapaian target pertumbuhan ekonomi, penurunan angka pengangguran dan penurunan angka kemiskinan. Adapun prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN tersebut meliputi :

1. Pembangunan Budaya
2. Pembangunan Hukum dan Tata Pemerintahan
3. Pembangunan Sosial dan Sumberdaya Manusia
4. Pembangunan Ekonomi dan Kegiatan Agribisnis Terpadu
5. Pembangunan Sarana dan Prasarana
6. Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup/Infrastruktur
7. Iklim investasi dan usaha
8. Energi
9. Lingkungan hidup dan bencana
10. Daerah tertinggal, terdepan, terluas dan pasca konflik
11. Pendidikan
12. Kesehatan
13. Ketahanan pangan
14. Kebudayaan kreativitas, dan inovasi teknologi
15. Prioritas lainnya :
 - a. Bidang di bidang Politik, Hukum dan Keamanan
 - b. Bidang Perekonomian



c. Bidang Kesejahteraan Rakyat

Berdasarkan Permendagri No. 32 Tahun 2012 prioritas pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan yang diorientasikan melalui pencapaian strategi pembangunan yang *pro-growth, pro-job, pro-poor* dan *pro-vironment*. Oleh karena itu perencanaan pembangunan pertanian yang disusun oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan harus mengacu dan menguatkan serta mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional ini.

Sementara itu, Kementerian Pertanian dalam membangun pertanian di Indonesia, mencanangkan 4 (empat) target utama, yaitu sebagai berikut:

- (1) Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan.
- (2) Peningkatan Diversifikasi Pangan.
- (3) Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, dan Ekspor.
- (4) Peningkatan Kesejahteraan Petani.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perencanaan pembangunan pertanian diarahkan agar dapat memprioritaskan :

- 1. Peningkatan Produksi** pertanian, melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi pertanian.
- 2. Peningkatan Produktivitas**, sehingga dengan luasan lahan yang sama, petani bisa memperoleh nilai tambah dari hasil usaha tani yang dilakukannya.
- 3. Peningkatan Mutu**, adalah usaha untuk menambah kualitas dan daya saing hasil pertanian.
- 4. Peningkatan Kesejahteraan Petani**, adalah tingkatan kondisi di mana petani sudah berada dalam keadaan bebas dari ketergantungan dan mampu mengembangkan usaha taninya



III.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan Pembangunan Pertanian di Kabupaten Lima Puluh Kota dan membantu Bupati Lima Puluh Kota dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang Pertanian dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas dalam mendukung pembangunan daerah.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi maka sasaran strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota yang dijadikan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura , dan perkebunan.

Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan.

Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran disajikan dalam tabel berikut:



Tabel. Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Daerah dan Sasaran Dinas

Visi	Misi	Tujuan	sasaran	Sasaran Dinas
MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI, BERADAT DAN BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH	Misi 2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional	meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat	meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian dan perikanan	meningkatnya produksi dan produktifitas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	Misi 4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan beserta indikator kerjanya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Pelayanan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan

No	Tujuan/	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya produksi dan Produktivitas Pertanian	Persentase kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB	Meningkatnya produksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Persentase peningkatan produksi Tanaman Pangan Hortikultura dan perkebunan	2,2%	2,2%	6,8%	5,7%	4,8%	4,3%
	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP)	Meningkatnya nilai SAKIP Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Nilai SAKIP Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	68,13	70,00	72,00	75,00	78,00	80,00



III.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Usulan Program dan Kegiatan disusun berdasarkan target IKU yang ingin dicapai dengan berpedoman pada renstra yang telah ada. Berdasarkan IKU Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota, Program dan kegiatan diarahkan untuk mencapai peningkatan produksi untuk Komoditi padi, jagung, jeruk, cabe, dan gambir.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan Pembangunan Pertanian di Kabupaten Lima Puluh Kota dan membantu Bupati Lima Puluh Kota dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang Pertanian dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas dalam mendukung pembangunan daerah.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Lima Puluh Kota, pada dasarnya kegiatan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai *“pendukung”* bagi pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Lima puluh Kota.

Sejalan dengan Visi Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022-2026 yaitu **“Mewujudkan Lima Puluh Kota yang Madani, Beradat, dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”**, maka program dan kegiatan yang dirancang Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program ini bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan tertib administrasi dalam penyelenggaraan urusan administrasi perkantoran di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.



2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan sarana pertanian berupa alat mesin pertanian, pupuk dan pestisida, dan sumber daya genetik (benih).

3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan prasarana pertanian berupa jaringan irigasi, jalan pertanian dan infrastruktur pertanian.

4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini bertujuan untuk memfasilitasi pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian

5. Program Perizinan Usaha Pertanian

Program ini bertujuan untuk memfasilitasi penerbitan rekomendasi izin usaha bertani

6. Program Penyuluhan Pertanian

Program ini bertujuan untuk peningkatan kelas kelompok tani

Untuk mewujudkan pengembangan jagung 20.000 ha di Kabupaten Lima Puluh Kota yang merupakan program unggulan daerah, dimana pada tahun 2024 merupakan tahun ke tiga pelaksanaan program diatas. pada tahun 2023 karena kondisi daerah, tidak ada pendanaan khusus untuk program unggulan daerah, namun pada tahun 2024 melalui Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani tingkat Kabupaten/ Kota, dengan jumlah total 119 unit Sekolah Lapang dengan 50 unit Sekolah Lapang berupa SL GAP Jagung.

Melalui SL GAP Jagung diarahkan kelompok tani untuk membuka lahan jagung seluas 1 Ha untuk Labor Lapang, dan 2 Hektar bukaan baru sebagai tindak lanjut pelaksanaan SL GAP Jagung ini.



T-B.36

**Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas
Kabupaten Lima Puluh Kota**

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor penentu keberhasilan
	Pertanian	2022		
	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar	Belum Tercapai (<)	Target belum tercapai, dikarenakan penurunan produksi dan luas panen yang disebabkan karena masivnya penanaman jagung yang merupakan program unggulan daerah	Strategi pengembangan jagung diarahkan kelahan bukan sawah



BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

TC-33 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel. Rencana Target Kinerja IKU KD/IKU OPD

No	Sasaran	Indikator	Target		Ket
			2023	2024	
1	Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan.	Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	29,31	30,14	

Tabel. Rencana Target Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target		Ket
			2023	2024	
1	Pertanian				
	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Ton/Ha	4,98	5,18	

**Tabel.
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kepala OPD**

No	Sasaran	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Meningkatnya produksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Persentase peningkatan produksi Tanaman Pangan Hortikultura dan perkebunan	2.2%	2.2%	6.8%	5.7%	-7.3	-21,96	7,96	6.8%	
	Meningkatnya nilai SAKIP Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Nilai SAKIP Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	68,13	70,00	72,00	75,00	78,86	68,13	68,35	72,00	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kab. Lima Puluh Kota
Tahun 2024

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.23.0000 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.23.0000 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN												68.824.038.489,00	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN												68.824.038.489,00	
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN												68.824.038.489,00	
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												22.984.068.796,00	
3	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												374.829.028,00	
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
		Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Singkronisasi Perencanaan	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Dokumen	85 %	12.844.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	26.622.225,00	
3	27	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
		Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Singkronisasi Perencanaan	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	85 %	8.777.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	15.339.890,00	
3	27	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
		Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Singkronisasi Perencanaan	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	85 %	9.647.700,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	16.045.399,00	
3	27	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
		Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase Singkronisasi Perencanaan	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	85 %	3.481.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10.262.464,00	
3	27	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD									
		Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase Singkronisasi Perencanaan	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	85 %	3.781.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10.472.700,00	
3	27	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
		Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Singkronisasi Perencanaan	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	14 Laporan	85 %	21.260.700,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	81.843.300,00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
3	27	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	85 %	74.547.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	214.243.050,00
3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								12.009.813.239,00				20.201.836.818,00
3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	170 Orang/bulan	100 %	11.992.784.739,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	170 Orang/bulan	20.154.691.818,00
3	27	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	11.813.300,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	16.170.000,00
3	27	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	1.760.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	5.775.000,00
3	27	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	100 %	2.340.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	21.000.000,00
3	27	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Dokumen	100 %	1.114.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	4.200.000,00
3	27	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								5.621.400,00				21.525.000,00
3	27	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	1.641.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	4.725.000,00
3	27	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	3.980.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	16.800.000,00
3	27	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah								730.000,00				4.500.000,00
3	27	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase Administrasi Pendapatan Daerah Pada Perangkat Daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	1 dokumen	730.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	4.500.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
3	27	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													
3	27	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	0 Dokumen	100 %	21.595.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	18.900.000,00
3	27	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	0 Dokumen	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 Dokumen	23.940.000,00
3	27	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	165 Dokumen	100 %	21.595.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	165 Dokumen	32.182.500,00
3	27	01	2.05	0008	Pemindahan Tugas ASN	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	0 Orang	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	0 Orang	997.500,00
3	27	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	0 Orang	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	11.970.000,00
3	27	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah													
3	27	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Paket	100 %	9.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	24.748.500,00
3	27	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Paket	100 %	10.300.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	24.280.200,00
3	27	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Paket	100 %	72.040.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	109.226.250,00
3	27	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Paket	100 %	24.812.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	100.957.500,00
3	27	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	230 Laporan	100 %	7.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	230 Laporan	25.200.000,00
3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	50 Laporan	100 %	196.280.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	399.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
3	27	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					0,00				296.100.000,00				
3	27	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	0 Unit	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	84.000.000,00
3	27	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	0 Unit	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	73.500.000,00
3	27	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	0 Unit	100 %	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	138.600.000,00
3	27	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					487.700.000,00				832.345.500,00				
3	27	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	15.750.000,00
3	27	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	19 Laporan	100 %	155.100.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	19 Laporan	173.995.500,00
3	27	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	39 Laporan	100 %	327.600.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	39 Laporan	642.600.000,00
3	27	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					338.395.997,00				481.530.000,00				
3	27	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah Yang Berkondisi Baik	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	172 Unit	100 %	222.750.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	172 Unit	397.425.000,00
3	27	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah Yang Berkondisi Baik	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	39 Unit	100 %	48.100.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	39 Unit	20.580.000,00
3	27	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah Yang Berkondisi Baik	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	19 Unit	100 %	67.545.997,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19 Unit	63.525.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN									27.708.695.983,00		
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian						827.187.000,00				19.300.000.000,00	
3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi						819.187.000,00					
					Persentase peningkatan Sarana Pertanian Yang Berkualitas	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Pengawasan Pemanfaatan Pupuk, Pestisida dan Alsintan	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 %	1 Laporan	13 Kecamatan	811.187.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan	3.150.000.000,00
3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian						8.000.000,00					
					Persentase peningkatan Sarana Pertanian Yang Berkualitas	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Pengawasan Pemanfaatan Pupuk, Pestisida dan Alsintan	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 %	1 Laporan	13 Kecamatan	8.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	16.150.000.000,00
3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota						8.000.000,00				8.408.695.983,00	
3	27	02	2.02	0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman											
					Persentase peningkatan Sarana Pertanian Yang Berkualitas	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Pengelolaan SDG	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 %	3 Dokumen	7 Komoditi	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	3 Dokumen	8.185.072.233,00
3	27	02	2.02	0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman											
					Persentase peningkatan Sarana Pertanian Yang Berkualitas	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	Pengelolaan SDG	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 %	1 Varietas Unggul Baru (VUB)	7 Komoditi	8.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	1 Varietas Unggul Baru (VUB)	223.623.750,00
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						26.000.000,00				11.950.600.000,00	
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian						26.000.000,00				605.700.000,00	
3	27	03	2.01	0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota											
					Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian Yang Berkualitas	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	Masterplan Pengembangan Prasarana Pertanian	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75 %	1 Dokumen	1 dokumen	26.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP 2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP 2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LC P2B yang dikelola	1 Dokumen	205.700.000,00
3	27	03	2.01	0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian											
					Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian Yang Berkualitas	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Masterplan Pengembangan Prasarana Pertanian	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75 %	0 Dokumen	1 dokumen	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	0 Dokumen	400.000.000,00
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian						0,00				11.344.900.000,00	
3	27	03	2.02	0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian											
					Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian Yang Berkualitas	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Pembangunan Prasarana Pertanian	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75 %	0 Unit	15 Jenis	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	830.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian Yang Berkualitas	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Pembangunan Prasarana Pertanian	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75 %	0 Unit	15 Jenis	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Fisik-Bidang Pertanian -Penugasan -Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	2.800.000.000,00
3	27	03	2.02	0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian Yang Berkualitas	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Pembangunan Prasarana Pertanian	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75 %	0 Unit	15 Jenis	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	425.000.000,00
3	27	03	2.02	0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian Yang Berkualitas	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Pembangunan Prasarana Pertanian	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75 %	0 Unit	15 Jenis	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	630.000.000,00
3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian Yang Berkualitas	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Pembangunan Prasarana Pertanian	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75 %	0 Unit	15 Jenis	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	1.170.000.000,00
3	27	03	2.02	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian Yang Berkualitas	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	Pembangunan Prasarana Pertanian	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75 %	0 Unit	15 Jenis	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	0 Unit	5.489.900.000,00
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN							16.000.000,00				551.500.000,00	
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota							16.000.000,00					551.500.000,00
3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persentase Fasilitas Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Yang Berkualitas	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Fasilitas Pengendalian OPT dan Pengendalian /Penanggulangan Bencana	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82 %	14 Ha	6 Komoditi	8.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	14 Ha	315.000.000,00
3	27	05	2.01	0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persentase Fasilitas Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Yang Berkualitas	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Fasilitas Pengendalian OPT dan Pengendalian /Penanggulangan Bencana	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82 %	13 Ha	6 Komoditi	8.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	13 Ha	84.500.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target						
3	27	05	2.01	0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam	Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Persentase Fasilitasi Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Yang Berkualitas	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Fasilitasi Pengendalian OPT dan Pengendalian /Penanggulangan Bencana	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82 %	0 Laporan	6 Komoditi	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	0 Laporan	152.000.000,00	
3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				8.000.000,00								174.959.210,00		
3	27	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				8.000.000,00									174.959.210,00	
3	27	06	2.01	0001	Penyusunan Standar Pelayanan Publik	Pemberian Izin Usaha Pertanian	Persentase Penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penyusunan, Penilaian, Pembinaan Izin Usaha Pertanian	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	0 Dokumen	56 dokumen	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	0 Dokumen	100.000.000,00	
3	27	06	2.01	0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian	Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Persentase Penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penyusunan, Penilaian, Pembinaan Izin Usaha Pertanian	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	0 Dokumen	56 dokumen	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	0 Dokumen	25.169.210,00	
3	27	06	2.01	0005	Pembinaan dan Pengawasan	Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Persentase Penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Jumlah Penyusunan, Penilaian, Pembinaan Izin Usaha Pertanian	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	26 Laporan	56 dokumen	8.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	26 Laporan	49.790.000,00	
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				5.677.344.900,00									5.454.214.500,00	
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				5.677.344.900,00										5.454.214.500,00
3	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Persentase Peningkatan kelas kelompok tani	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kelas Kelompok Tani	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 %	13 Unit	26 Kelompok Tani	149.500.000,00	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	13 Unit	1.598.656.500,00	
3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan	Petani di Kecamatan dan Desa	Persentase Peningkatan kelas kelompok tani	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kelas Kelompok Tani	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 %	0 Unit	26 Kelompok Tani	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 Unit	1.272.558.000,00	
3	27	07	2.01	0003	Penyediaan dan Pemanfaatan	Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan kelas kelompok tani	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kelas Kelompok Tani	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 %	0 Unit	26 Kelompok Tani	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	0 Unit	735.000.000,00	
3	27	07	2.01	0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan	Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan kelas kelompok tani	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Peningkatan Kelas Kelompok Tani	- Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 %	119 Unit	26 Kelompok Tani	5.527.844.900,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DBH Cukai Hasil Tembaku (CHT)	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	119 Unit	1.848.000.000,00	
TOTAL													19.872.159.236,00				68.824.038.489,00		

PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah ini disusun mengacu pada RPJMD tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026 masing-masing Perangkat Daerah.

Renja Perangkat Daerah memuat hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Renja tahun lalu, permasalahan dan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada tahun yang akan datang.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan personil Perangkat Daerah. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur Perangkat Daerah, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah juga sangat tergantung kepada keseriusan segenap unsur Perangkat Daerah dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut selama satu tahun yang akan datang, baik dari segi tata kelola sumber daya manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perlengkapan.

Diharapkan pada awal tahun anggaran berjalan atau awal tahun 2024, seluruh kebutuhan pelaksanaan program/kegiatan tersebut sudah dapat diselesaikan.

Demikian Renja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.



BUPATI LIMA PULUH KOTA

SAFARUDDIN DT, BANDARO RAJO